

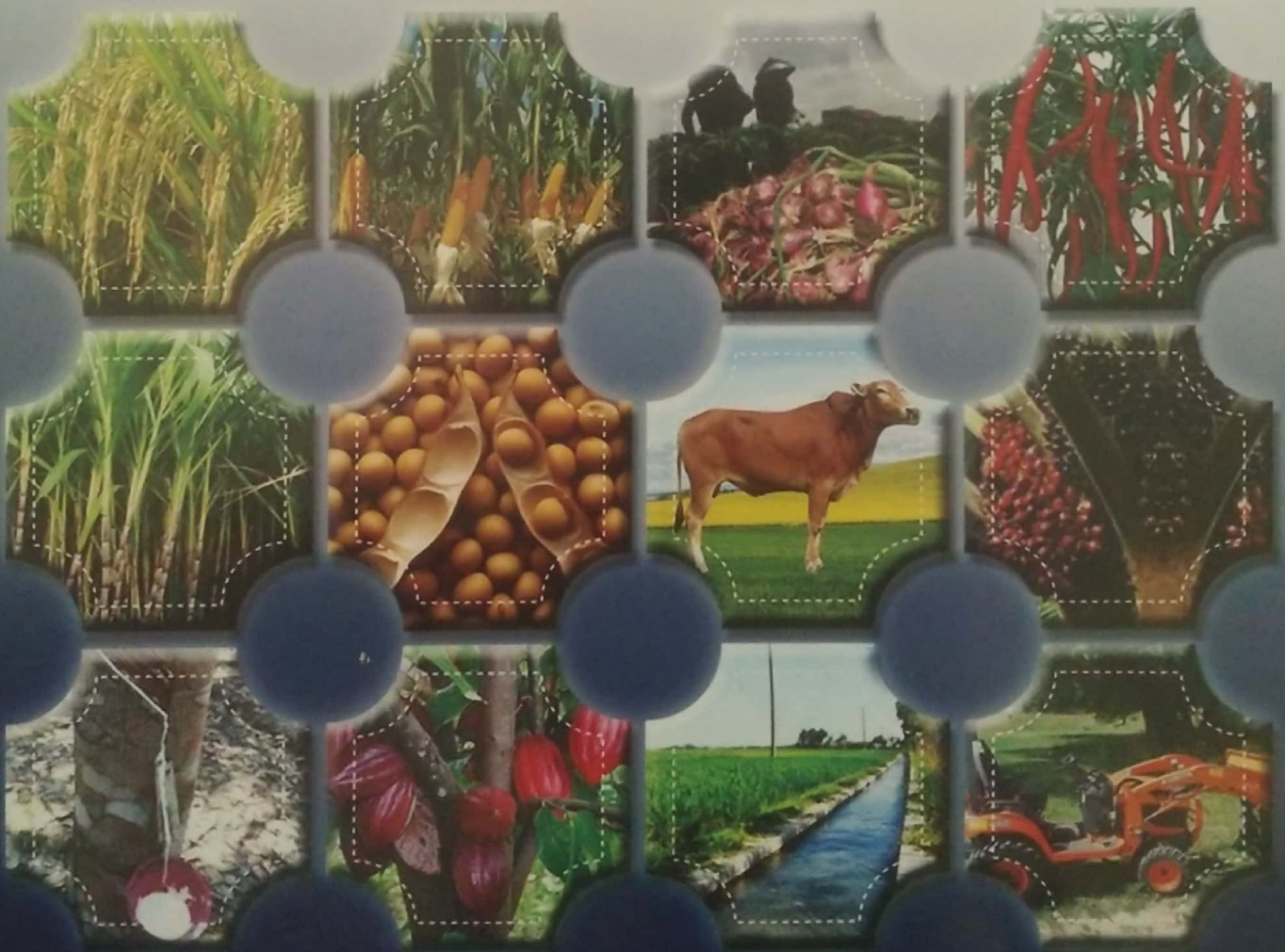


KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2021

SENIN, 1 NOVEMBER 2021
EDISI ; 00226474/GBP/XI/2021

KLIPING

Berita Pertanian



GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

SENIN, 1 NOVEMBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. TANAMAN PANGAN :
 - La Nina Bantu Produksi Padi (R)..... 1
2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - Peternakan akan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah (SI)..... 2
3. PERKEBUNAN :
 - UNSP Bakal Memangkas Tanaman Karet (KN)..... 3
 - Pemerintah Diminta Turunkan Harga Minyak (R)..... 4-5
4. PERTANAIAAN UMUM :
 - Syahrul Yasin Limpo Ditunjuk Sebagai Ad Interim Menteri LHK (SI) 6
 - Pertanian Takalar Harapan Indonesia Timur (MI)..... 7

II. PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

ARTIKEL DAN OPINI :

- Ancaman La Nina (MI)..... 8
- Memformulasikan Aturan Tembakau di Tengah Pandemi (SI)..... 9-10
- Menggali Potensi Tersembunyi Tanaman Porang (MI)..... 11-13
- Pahami Amarah Petani Bawang Merah (SI)..... 14

oooooooo O ooooooooo

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 30/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

La Nina Bantu Produksi Padi

Fenomena La Nina akan meningkatkan curah hujan 20 sampai 70 persen.

■ DEDY DARMAWAN
NASUTION, FEBRYAN A

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi padi pada periode musim tanam pertama Oktober 2021-Maret 2022 akan mengalami peningkatan. Kementan mengakui saat ini La Nina tengah muncul dalam kategori lemah-sedang. Kementan meyakini, fenomena alam tersebut justru akan membantu proses pertanaman padi.

"Kondisi La Nina tentu curah hujan di atas normal, tapi masih kategori lemah-sedang seperti prediksi BMKG," kata Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab kepada *Republika*, Jumat (29/10).

Ismail mengatakan, La Nina belum berpotensi menyebabkan banjir. Bahkan, ujarnya, sebagian wilayah masih belum merasakan hujan. Meski begitu, Kementan tetap melakukan percepatan musim tanam pada periode tanam Oktober-Maret kali ini khususnya di wilayah-wilayah kering yang mengandalkan air hujan.

Ismail menyampaikan, La Nina yang masih dalam kategori sedang justru bisa membantu pertanaman padi. Kementan bersama daerah sentra pertanaman padi berupaya mengamankan potensi air hujan untuk mengisi waduk-waduk yang

sudah dibangun pemerintah.

"Waduk-waduk yang kosong dengan adanya La Nina akan memungkinkan menyalurkan air lebih luas kepada sawah-sawah dan mudah-mudahan kita bisa menambah luas tanam," katanya.

Kementan menargetkan, luas tanam pada periode pertanaman pertama dapat mencapai 8 juta hektare (ha). Ismail mengatakan, target yang dipatok cukup tinggi karena didukung curah hujan saat ini yang cenderung ada sepanjang tahun. Sehingga, hal itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi.

"Target ini memang tinggi. Kalau itu tercapai dengan produktivitas 5 ton per hektare saja, bisa diperoleh sekitar 40 juta ton gabah kering giling (GKG)," kata dia.

Jumlah tersebut naik dari periode Oktober 2020-Maret 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, realisasi luas panen pada periode tersebut mencapai 4,58 juta ha. Sementara itu, produksi GKG yang dihasilkan selama periode tersebut tercatat sebesar 25,16 juta ton.

"Harapan kita curah hujan tahun depan bisa menyambung terus hingga pada Mei-Agustus karena itu merupakan titik kritis pada musim kering. Kalau hujan terus turun wilayah-wilayah yang biasanya panas bisa tanam apa pun," katanya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, fenomena La Nina

akan meningkatkan curah hujan 20 sampai 70 persen di berbagai wilayah di Indonesia mulai November 2021 hingga Januari 2022. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, fenomena La Nina berkaitan dengan

pendinginan suhu di Samudera Pasifik bagian tengah. Data pada dasarian III September menunjukkan suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah telah melewati ambang batas La Nina.

Pada periode tersebut, suhu muka laut sudah di angka minus 0,63. Lalu, angka itu menjadi minus 0,61 pada dasarian I Oktober. Terbaru, pada dasarian II Oktober, suhu muka laut turun drastis ke angka minus 0,92.

"Apabila mencapai minus 1, itu artinya sudah mulai terjadi La Nina dengan intensitas moderat. Artinya, penguatan ini (seiring berjalannya waktu) semakin meningkat," kata Dwikorita dalam Rakornas Antisipasi La Nina pada Jumat (29/10).

Dwikorita memprediksi, intensitas La Nina tahun ini akan serupa dengan tahun lalu. Pada 2020, curah hujan meningkat 20 hingga 70 persen di atas normal sepanjang November hingga Januari. Peningkatan curah hujan itu terjadi di berbagai wilayah Indonesia terutama di wilayah Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi Selatan. ■ ed: ahmad fikri noor

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 17/11/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 19/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Peternakan Akan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

JAKARTA - PT Jamkrindo melanjutkan program pemberdayaan masyarakat di Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark untuk memperkuat usaha rakyat agar bertahan di era pandemi Covid-19 ini. Setelah mendampingi dan memberdayakan masyarakat melalui rintisan usaha budi daya sayur secara hidroponik, optimalisasi *homestay*, dan produksi keripik mangga, Jamkrindo kini mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui budi daya kambing dan domba.

Pemberdayaan masyarakat melalui budi daya kambing dan domba dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain pemberian pelatihan dan juga bantuan kandang komunal dan bibit domba/kambing untuk kelompok peternak kambing di Geopark Ciletuh dan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Adapun pemberian pelatihan dan bantuan tersebut sifatnya berkelanjutan dan telah dilakukan sejak awal 2021.

S1.14
Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan PT Jamkrindo Sulis Usdoko mengatakan, sektor peternakan merupakan sektor penting untuk menggeliatkan aktivitas perekonomian daerah. "Sektor peternakan mempunyai sifat strategis sebagai motor penggerak pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan karena sifatnya sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan juga sumber pendapatan rumah tangga,"



ujar Sulis dalam keterangan tertulisnya.

Dalam melakukan pemberdayaan, dia percaya bahwa terdapat tiga hal yang penting yang harus dilakukan, yaitu komitmen, kapasitas, dan konsistensi atau K3. Tanpa adanya konsistensi atau keberlanjutan hampir pasti semua perencanaan dan strategi implementasi akan gagal.

"Maka itu, kami kembali memberikan pelatihan untuk peternak domba dan kambing kepada masyarakat di Cikidang dan Geopark Ciletuh melalui Workshop Budi Daya Kambing Unggulan. Ini merupakan wujud komitmen kami untuk mendukung perekonomian daerah, khususnya Kabupaten Sukabumi," ujar Sulis.

Secara umum, ia melanjutkan, tujuan pelatihan kali ini ialah untuk memberi *awareness* me-

ngenai nilai tambah kambing unggulan dan beternak secara modern. Dalam situasi pandemi ini, *workshop* dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. "Semoga dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kapabilitas dan kapasitas usaha peternakan rakyat," ujar Sulis.

Materi pelatihan dasar budi daya kambing dan domba disampaikan oleh praktisi peternakan modern dan akademisi IPB. Melalui pelatihan tersebut, peternak akan mendapatkan inspirasi dan pengetahuan nilai tambah kambing yaitu produksi susu dan juga penjualan daging.

"Kami akan mendampingi tidak hanya di hulu, namun juga di hilir, yaitu juga membantu dari sisi *marketing* atau mempertemukan dengan *buyer* potensial agar para peternak terhubung dalam sebuah ekosistem yang produktif," ujar Sulis. **Antonc**

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/11/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 12/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

■ PERKEBUNAN

UNSP Bakal Memangkas Tanaman Karet

JAKARTA. PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP) berencana mengurangi jumlah tanaman karet yang berada di area perkebunan mereka.

Direktur PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk, Andi W. Setianto menyampaikan, pihaknya berencana mengganti tanaman karet menjadi kelapa sawit mulai tahun 2022 mendatang. Kelak, tanaman sawit pengganti karet tersebut akan menggunakan bibit unggul bernama ASD-Bakrie.

ASD merupakan singkatan dari Agricultural Service & Development, perusahaan penyedia bibit unggul asal Kosta Rika yang telah bekerja sama dengan UNSP sejak tahun 1994 silam. UNSP telah mengimpor bibit unggul dari

ASD sejak 2006.

"Peremajaan dengan bibit unggul ASD-Bakrie hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk panen, atau lebih cepat dibandingkan karet yang butuh waktu lima tahun untuk panen," ungkap Andi, akhir pekan lalu. **KP-12**

Namun manajemen UNSP belum bisa memaparkan luas lahan perkebunan karet yang hendak diganti menjadi tanaman sawit, termasuk nilai investasi yang UNSP butuhkan untuk kegiatan tersebut.

Selain lebih cepat waktu panennya, pergantian tanaman karet menjadi sawit lantaran potensi hilirisasi sawit dianggap lebih menjanjikan. Hal ini nantinya akan berdam-

pak pada perbaikan profitabilitas dan arus kas perusahaan tersebut.

Andi pun mengaku bahwa kontribusi pendapatan tanaman karet terhadap total pendapatan UNSP dalam tren yang menurun akhir-akhir ini. Bakrie Sumatra Plantations memproduksi karet untuk berbagai keperluan seperti bahan baku ban premium hingga industri medis.

Sebagai informasi, per semester I-2021 penjualan neto UNSP mencapai Rp 1,77 triliun. Dari jumlah itu, porsi penjualan neto karet UNSP berada di level Rp 197,34 miliar. Angka tersebut kalah jauh dibandingkan penjualan neto oleokimia senilai Rp 810,64 miliar serta kelapa sawit dan

produk turunannya sebesar Rp 766,53 miliar.

Mengutip materi paparan publik pada Agustus 2021, UNSP mengalami penurunan produksi karet alam sebesar 1% (yoy) menjadi 14.700 ton. UNSP memiliki luas area perkebunan karet mencapai 16.502 hektare (ha). Dari situ, total area yang ditanami karet usia matang seluas 15.766 ha, sedangkan area tanaman karet yang belum matang seluas 736 ha.

UNSP memiliki tiga pabrik pengolahan karet dengan total kapasitas produksi 45.843 metrik ton per tahun yang berlokasi di Sumatra Utara, Bengkulu dan Lampung.

Dimas Andi Shadewo

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/11/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pemerintah Diminta Turunkan Harga

Kenaikan harga minyak goreng adalah konsekuensi lonjakan harga CPO.

Minyak

■ IIT SEPTYANINGSIH

JAKARTA — Harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami lonjakan. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyebut, harga minyak goreng bahkan menembus Rp 30 ribu per liter di Maluku dan Sulawesi. Ketua Ikappi Abdullah Mansuri meminta pemerintah segera melakukan intervensi harga.

"Ini yang membuat kami mendorong pemerintah segera lakukan langkah percepatan supaya ada penurunan (harga)," ujar Abdullah ketika dihubungi *Republika*, Ahad (31/10). R 10

Abdullah mengatakan, harga minyak goreng mulai berfluktuasi pada pertengahan tahun ini. Kendati demikian, lonjakan harga dalam beberapa waktu terakhir menjadi semakin tinggi.

Menurut Abdullah, saat ini tengah terjadi kenaikan harga minyak sawit di level dunia. Akan tetapi, ujar Abdullah, harga produk sawit seperti minyak goreng di Indonesia semestinya bisa lebih terkendali. Ikappi mendorong agar pemerintah mengumpulkan semua pengusaha minyak goreng dan segera menekan laju kenaikan harga.

"Jadi, harus ada langkah-langkah ke depan supaya tidak terjadi lagi," ujar dia.

Seruan serupa juga disampaikan anggota Komisi VI DPR Mufti Anam. Dia mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) bergerak cepat merespons harga minyak goreng yang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir di sejumlah wilayah Tanah Air.

"Banyak pelaku usaha makanan skala UMKM yang kesulitan dengan naiknya harga minyak goreng," kata Mufti.

Ia mengatakan, selain berdampak ke ekonomi, kenaikan minyak goreng bisa berdampak negatif ke kesehatan. Menurutnya, warga berpotensi memakai minyak goreng berulang-ulang untuk menghemat penggunaan.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga rata-rata minyak goreng curah pada Oktober 2021 adalah Rp 14.489 per liter. Angka itu naik hingga 20 persen dibandingkan harga Januari 2021 dan melambung 5,07 persen dibandingkan September 2021 yang berada di kisaran Rp 12 ribu.

"Bahkan, di beberapa wilayah di

Jatim kalau dicek di pusat harga pangan itu bisa Rp 17 ribu per liter," tutur Mufti.

Mufti mengatakan, kenaikan harga minyak goreng adalah konsekuensi dari lonjakan harga bahan bakunya, yakni CPO. Sehingga, kendala pasokan di pasar memadai, harga tetap naik karena harga bahan bakunya juga melonjak. Meski demikian, Mufti meminta pemerintah tidak semata-mata menyerahkan harga kepada mekanisme pasar sesuai fluktuasi harga CPO.

"Harga minyak goreng memang terkait erat CPO sebagai bahan baku utamanya. Di sisi lain, banyak produsen yang tidak terintegrasi dengan perkebunan sawit sehingga sangat memengaruhi penentuan harga minyak goreng. Tetapi, tetap pemerintah, dalam hal ini Kemendag, harus hadir memberi solusi," ujarnya.

Dalam jangka pendek, menurutnya, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag harus segera melakukan intervensi. "Kemendag bisa melakukan operasi pasar dengan sistem penyaluran, target sistem yang tepat. Operasi pasar sebatas membantu, karena untuk stabilisasi harga tidak akan bisa mengingat kemampuan operasi pasar

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/11/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 60 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

pemerintah juga terbatas," ujarnya.

Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, Kemendag harus memiliki skema antisipasi yang lebih baik dengan mengamati tren perdagangan CPO dunia. Misalnya, saat ini banyak pakar menyebut harga CPO bakal terus melambung hingga kuartal II 2022 karena faktor musiman.

"Maka, perlu antisipasi. Gawat kalau harga terus melonjak sampai tahun depan," ujarnya.

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Muhammad Nur menyampaikan, komoditas minyak goreng menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Oktober 2021. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada pekan keempat Oktober 2021, perkembangan harga pada bulan lalu masih terkendali dan diperkirakan inflasi sebesar 0,1 persen (mtm).

Penyumbang utama inflasi Oktober 2021 sampai dengan pekan keempat, yaitu komoditas cabai merah sebesar 0,07 persen (mtm), minyak goreng sebesar 0,04 persen (mtm), rokok kretek filter sebesar 0,02 persen (mtm) serta cabai rawit, daging ayam ras, dan angkutan udara masing-masing sebesar 0,01 persen (mtm). Sementara itu, beberapa komoditas mengalami deflasi, antara lain telur ayam ras dan tomat masing-masing sebesar -0,03 persen (mtm) serta bawang merah, bayam, kangkung, sawi hijau, dan emas perhiasan masing-masing sebesar -0,01 persen (mtm). Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Oktober 2021 secara tahunan kalender sebesar 0,91 persen (ytd) dan secara tahunan sebesar 1,64 persen (yoy).

■ antara ed: ahmad fikri noor

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Syahrul Yasin Limpo Ditunjuk sebagai Ad Interim Menteri LHK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebagai Ad Interim Menteri LHK terhitung 29 Oktober hingga 7 November 2021. Penunjukan ini sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara nomor :B-759/M/D-3/AN.00.03/09/2021 perihal Penunjukan Menteri Pertanian sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Ad Interim tanggal 27 September 2021.

Dalam surat tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno berkenan menunjuk Menteri Pertanian sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ad Interim selama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan perjalanan dinas ke Glasgow,

Inggris. Direncanakan Menteri Siti Nurbaya akan kembali ke Jakarta pada 7 November 2021.

Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo juga pernah ditunjuk sebagai ad interim Menteri Kelautan dan Perikanan. Saat itu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Edhy Prabowo karena jadi tersangka KPK.

sudarsono 51.9

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/11/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 15/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pertanian Takalar Harapan Indonesia Timur

KABUPATEN Takalar, Sulawesi Selatan, selalu bisa membuat Syahrul Yasin Limpo berbunga-bunga. Pasalnya, daerah itu dikenal sebagai penghasil pertanian unggulan.

Bukan hanya tanaman pangan seperti padi dan jagung, petani Takalar juga dikenal cakap dalam membudidayakan tanaman hortikultura, baik sayuran maupun buah-buahan.

Datang lagi ke Takalar, pekan ini, Menteri Pertanian itu mendorong daerah ini menjadi pintu gerbang utama pasokan tanaman hortikultura dan pangan untuk wilayah Indonesia bagian timur. "Takalar bisa memasok kelapa, jeruk, padi, dan jagung," jelasnya saat berada di Kecamatan Galesong.

Dari Takalar, lanjut Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu, urusan sektor pertanian di Sulawesi bisa selesai. "Semua desa memiliki komoditas unggulan di bidang pertanian." **M-15**

Kepada para petani, Syahrul meyakinkan mereka bahwa pertanian sangat menjanjikan. Sektor ini sudah semakin maju dan modern.

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga terus berupaya membuka akses ke pasar dunia yang lebih luas lagi. "Hanya pertanian yang bisa menyangga ekonomi Indonesia selama dua tahun terakhir. Saat yang lain tumbuh minus, pertanian naik 16,2%."

Ke depan, ia berharap jutaan petani milenial akan tercipta. Kementerian Pertanian akan melakukan pendampingan dan pelatihan untuk mereka.

"Selain cakap dalam budi daya pertanian, mereka juga dilatih mendapatkan akses kredit perbankan. Yang tidak kalah penting, mereka diberi kemampuan untuk membuka pasar yang lebih luas," tegas Menteri.

Sapi bali

Perhatian terhadap dunia pertanian juga datang dari kalangan kampus. Di Bali, peneliti dan pakar peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, I Nyoman Kaca, mengajak peternak melakukan

penganekaragaman pakan. "Tidak hanya membantu pertumbuhan ternak, upaya itu juga sangat berpengaruh terhadap berat lahir anakan."

Ia mencontohkan sapi Bali. Berat anakan rata-rata saat ini ialah 18 kilogram. Jika melakukan penganekaragaman pakan, ia optimistis bisa meningkat hingga 20 kg.

"Selain hijauan, pakan bisa berupa daun pisang dan batang pisang," papar Wakil Rektor Universitas Warmadewa itu.

Masih di Bali, Dirjen Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru, juga memberi dorongan kepada pengembangan budi daya kerapu, lobster, dan udang *vaname* di Kabupaten Jembrana. "Kami

akan memberi dukungan penuh pada upaya pembudidayaan komoditas kelautan."

Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengaku daerahnya tengah membangun kawasan budi daya udang *vaname* dengan target produksi 2.500 ton per tahun. "Kami juga minta dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan Kampung Kerapu dan Kampung Lobster di Desa Candikusuma," tandasnya.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan apresiasi kepada petani kentang di Kabupaten Karo. Mereka terus berinovasi mengembangkan berbagai bibit kentang dengan metode bertingkat. (OL/YP/GL/N-2)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 30/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

EDITORIAL

Ancaman La Nina

LA Nina akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia dari November 2021 hingga Februari 2022. Fenomena alam itu menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan lebih tinggi, bahkan hingga level ekstrem.

Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan akan meningkat hingga mencapai 100%. Peningkatan curah hujan 70%-100% pada November 2021 akan terjadi di Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Selanjutnya, pada Desember 2021, peningkatan curah hujan 70%-100% akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan NTT.

Curah hujan tinggi yang disertai angin kencang, selain berdampak pada sektor pertanian dan perikanan, juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi.

Di sektor pertanian, La Nina menyebabkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya kerusakan tanaman dan lahan akibat banjir yang muncul dari curah hujan tinggi, meningkatnya kelembapan udara, dan munculnya organisme pengganggu tanaman. Pascapanen, curah hujan yang tinggi akan mengurangi kualitas hasil panen karena kadar air yang meningkat.

Sementara itu, di sektor perikanan, La Nina menyebabkan para nelayan harus lebih waspada saat melaut. Kondisi itu mengakibatkan pasokan ikan dapat berkurang dan juga bisa mengancam keselamatan para nelayan.

Potensi bencana hidrometeorologi patut diantisipasi karena La Nina bisa memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, badai tropis, dan pohon tumbang.

Perihal dampak buruk La Nina itu, tentu perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan pengurangan risiko bencana.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera mengosongkan 205 bendungan yang mempunyai volume tampung-

4,7 miliar meter kubik untuk mengantisipasi adanya peningkatan volume air.

Kementerian ESDM, Badan Geologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan BNPB untuk melakukan dan mulai menyiapkan langkah antisipasi.

Begitu juga dengan pemerintah daerah. Mereka harus terus-menerus awas terhadap perkembangan cuaca. Jangan lagi anggap remeh prakiraan cuaca. Ketidakpedulian terhadap prediksi cuaca itulah yang membuat penanganan bencana hidrometeorologi seperti datang tiba-tiba.

Padahal curah hujan yang tinggi sudah diramalkan BMKG, tetapi tidak ada yang menghiraukan. Ramalan cuaca berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dengan tingkat akurasi tinggi itu pantas dijadikan dasar kebijakan pemerintah dalam mitigasi bencana.

Paling umum dari bencana hidrometeorologi ialah datangnya banjir. Kepala daerah harus benar-benar memastikan sistem mitigasi bencana berjalan baik.

Benahi infrastruktur mitigasi di wilayah rawan bencana, cek kembali tempat pengungsian, segera rampungkan proyek saluran air untuk tangkal banjir. Jangan sampai karena ketidaksiapan kondisi di lapangan, upaya mitigasi banjir tidak berjalan.

Seperti di wilayah DKI Jakarta, misalnya. Gubernur Anies Baswedan memprediksi banjir akan surut dalam 6 jam, tetapi kenyataannya banjir di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (27/10), butuh waktu 9 jam lebih untuk surut. Mitigasi tidak bisa mengandalkan teori, harus benar-benar dicek kondisinya di lapangan.

Tentu kita tidak mau lagi jatuh korban akibat bencana yang sebenarnya mampu diantisipasi ini. Pasalnya, tidak sedikit saudara kita yang menjadi korban. Di sepanjang 2021 hingga September saja sudah 508 jiwa meninggal dunia, 69 dinyatakan hilang, 12.881 luka-luka, dan sebanyak 5,8 juta jiwa harus mengungsi atau menderita.

Saat cuaca dan fenomena alam bisa diprediksi, tentunya mitigasi bencana bisa dilakukan. Mitigasi bencana tidak hanya dengan memperkuat koordinasi di tingkat pelaksanaan melalui rapat-rapat, tapi yang paling penting ialah memastikan kesiapan masyarakat di tingkat paling bawah dalam menghadapi bencana.

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 30/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 18 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Memformulasikan Aturan Tembakau di Tengah Pandemi



NUR NADLIFAH

Anggota Komisi IX DPR

Hari-hari ini wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan masih memanás. Poin yang minta direvisi antara lain pembesaran gambar peringatan kesehatan pada bungkus rokok menjadi 90% serta larangan aktivitas iklan, promosi, dan pemajangan produk. 5/30/10/11

Kelompok yang mengatasnamakan kesehatan terus mendesak revisi ini di tengah situasi sulit pandemi Covid-19. Narasi utama yang dipakai adalah iklan dan promosi membuat tingkat konsumsi (prevalensi) rokok anak berusia 10-18 tahun naik. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menjadi patokannya. Di sana ditulis prevalensi perokok anak naik

jadi 9,1% dari 7,2% di 2013.

Narasi ini tak sepenuhnya benar. Sebab jika mengacu Badan Pusat Statistik (BPS), persentase anak Indonesia usia 10-18 tahun yang merokok justru turun selama 2018-2020. Tahun 2018 jumlahnya tercatat 9,65% dan terus turun di 2019 (3,87%) dan 2020 (3,81%). Secara rinci, perokok anak usia 10-12 tahun (0,13%), usia 13-15 tahun (1,64%), dan usia 16-18 tahun (10,07%).

Sederet pertanyaan lantas muncul manakala kita menelisik lebih dalam motif politik dan bisnis di balik polemik revisi ini. Benar saja, fakta-fakta mulai terkuak saat kita membedah lebih jauh pihak yang bersikeras mendorong revisi serta data dan fakta lapangan lainnya.

Setidaknya ada tiga alasan wacana revisi PP 109/2012 semestinya tidak dilanjutkan. Pertama, campur tangan asing dalam mengatur strategi mematikan industri yang telah memberikan sumbangan besar terhadap ekonomi di Tanah Air begitu kentara. Keberadaan asing terutama didanai Bloomberg Philanthropies milik politisi Partai Demokrat Amerika Serikat, Michael Bloomberg. Bloomberg lewat Strategic Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) sejak 2017 telah mengucurkan dana lebih dari US\$700 juta untuk memengaruhi kebijakan tembakau berbagai negara,

termasuk Indonesia.

CTFK menggandeng hampir seluruh kalangan lokal, termasuk LSM dan pemerintah setempat, demi mengendalikan kebijakan tembakau secara seragam. Secara spesifik, dokumen CTFK yang bocor menyebut mereka bekerja sama dengan otoritas terkait untuk mengorganisasi dan mendanai "lokakarya penyusunan hukum" saat mendorong 300 kota/kabupaten menerapkan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tahun 2018.

Kondisi ini sangat miris saat disandingkan dengan temuan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-PBNU) soal rencana revisi PP 109/2012. Riset Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini menemukan berbagai fakta ihwal PP 109/2012. Menurut LAKPESDAM-PBNU, aturan ini terbukti menekan pergerakan petani tembakau di Pamekasan (Madura), Rembang (Jawa Tengah), dan Lombok (Nusa Tenggara Barat) sekaligus memicu keresahan masyarakat industri hasil tembakau (IHT) karena banyaknya pembatasan

produksi, pengolahan, pemasaran, dan konsumsi produk tembakau.

Aturan ini juga melahirkan ketidakpastian usaha akibat lemahnya akses informasi oleh petani. Sampai sekarang pemerintah juga belum mempersiapkan



KORAN SINDU WAWAN BAJARAN

alih komoditas tembakau yang setara kontribusinya baik pendapatan negara maupun kesejahteraan petani. Terakhir, akibat berbagai tekanan saat ini hanya tertinggal 45 dari 272

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 30/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

industri tembakau di tahun 2012.

Pendek kata, LAKPESDAM-PBNU menegaskan dorongan revisi PP 109/2012 hanyalah hasil politisasi tanpa mempertimbangkan capaian, dampak dan implementasi.

Usulan revisi ini sama sekali tidak dipertimbangkan secara komprehensif karena evaluasi menyeluruh dampak kebijakan terhadap mata rantai IHT saat ini belum ada.

Dari sisi hukum juga terdapat cacat logika mendasar tentang produk hasil tembakau. Ada kesan produk hasil tembakau ilegal dan melanggar undang-undang sehingga tidak layak diperdagangkan dan patut dipersalahkan atas seluruh masalah kesehatan di Indonesia.

Padahal, banyak aturan yang sudah menegaskan mengenai legalitas produk ini. Beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mulai Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008, Nomor 6/PUU-VII/2009, Nomor 19/PUU-VIII/2010, hingga Nomor 71/PUU-XI/2013 seluruhnya menegaskan bahwa negara tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang untuk

dipublikasikan dan diperjualbelikan. Negara juga tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkih sebagai komoditas pertanian yang dilarang. Hal ini semakin dipertegas dengan penarikan cukai terhadap produk tersebut.

Produk tembakau juga tak bisa dipersalahkan atas persoalan kesehatan di Indonesia, termasuk defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasal 10 Undang-Undang 24/2011 tentang BPJS Kesehatan memerintahkan lembaga ini membiayai pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program jaminan sosial.

Soal defisit dana jaminan sosial, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 7P/HUM/2020 telah mengaturnya. Di sana ditulis kesalahan dan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang membuat defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan tidak boleh dibebankan ke masyarakat.

Kondisi Sosial Ekonomi Alasan kedua yang membuat wacana revisi PP 109/2012 patut dihentikan adalah kontradiksi data. Data BPS yang berbasis Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat prevalensi rokok anak berusia di bawah 18 tahun pada 2020 sebesar 3,81%, atau lebih rendah dari data Riskesdas dan

terus turun dari tahun ke tahun. Data BPS adalah informasi resmi yang tidak dapat diabaikan.

Alasan terakhir tentu situasi domestik Indonesia. Kita bukan hanya sedang mengalami krisis kesehatan, melainkan juga sosial dan ekonomi. Revisi aturan yang terlalu dipaksakan justru berpotensi memicu gejolak politik di akar rumput dan sama sekali belum tentu mampu mencapai tujuan utamanya.

Publik berharap pemerintah mencurahkan fokus dan energinya mempercepat penanganan pandemi. Aksi-aksi lain di luar penanganan pandemi yang berpotensi menguras energi akan melukai perasaan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah akan dianggap tak punya empati dan sensitivitas atas masalah yang ada. Terlebih, ada tambahan pengangguran 9,7 juta orang akibat Covid-19.

Formulasi aturan tembakau rasanya tidak tepat jika dibahas di tengah kesengsaraan rakyat. Salah langkah sedikit saja malah semakin mematikan banyak pihak di dalamnya. Rakyat menunggu langkah taktis dan strategis untuk pemulihan bangsa agar ekonomi kembali bangkit. Semoga pemerintah tetap istiqomah mengawal kepentingan rakyat bukan malah mengikuti agenda oknum yang sudah banyak memicu kegaduhan di negeri tetangga. □

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 31/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Menggali Potensi Tersembunyi Tanaman Porang

PORANG merupakan tanaman khas Indonesia yang banyak tersebar di dataran tinggi. Tanaman ini pertama kali dikenal khalayak ramai saat diperkenalkan Presiden Jokowi pada 2021. Setelah itu, potensi porang mulai dilihat masyarakat luas.

Porang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, di antaranya *MI. 31/10/21* mengurangi risiko kanker, menurunkan kadar kolesterol, serta menjadi alternatif makanan sehat bagi masyarakat. Produk olahan porang juga banyak ditemui pada keripik serta tepung olahan.

Saat ini pemerintah menargetkan peningkatan luas tanam porang di Indonesia. Pada 2024, pemerintah menargetkan luas tanam porang mencapai 100.000 hektare (ha). Hal ini dilakukan pemerintah agar produk turunan porang dapat dimanfaatkan masyarakat luas dan meningkatkan nilai ekspor tanaman porang.

Mengenal Porang

- Memiliki nama latin *Amorphophallus muelleri*
- Memiliki produk turunan bernilai tinggi.
- Memiliki kandungan glukomanan yang tinggi.

Beberapa Produk Turunan Porang

- Keripik porang
- Tepung porang
- Tepung glukomanan
- Beras

Keunggulan

- Toleran terhadap naungan antara 40%-60%.
- Dapat ditumpangsarikan dengan tanaman keras (pepohonan).
- Banyak tumbuh liar di pekarangan atau pinggiran hutan di bawah naungan pepohonan lain.

Produk Olahan Porang

- Pengembang mi
- Bahan pengental
- Bahan pengikat pada pembuatan sosis
- Bahan baku lem atau perekat kertas
- Pelapis kedap air
- Cat

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 31/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Ciri-Ciri Porang

- **Daun**
Ujung daun lancip dan berwarna hijau muda.
- **Batang**
Kulit batang lebih halus dan berwarna belang hijau putih.
- **Umbi**
Tidak memiliki bintil, berserat halus, dan berwarna kuning.
- **Bulbil/bibit**
Terdapat di setiap pertemuan cabang.

Beberapa Kandungan Gizi dalam Porang

- Karbohidrat ▶
- Lemak ▶
- Protein ▶
- Mineral ▶
- Vitamin ▶
- Serat pangan ▶

Komponen Karbohidrat Porang

- ▶ Pati
- ▶ Glukomanan
- ▶ Serat kasar
- ▶ Gula reduksi

Cara Budi Daya Porang

- Ditanam ketika musim penghujan.
- Bisa ditanam bersama pohon besar pelindung.
- 1 benih per lubang tanam dengan tunas ke atas.
- Jarak tanam 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 150 x 150 cm.
- Tutup dengan tanah subur setebal 3 cm.
- Siram secukupnya dan jangan sampai kekeringan air lebih dari 4 hari.
- Penumpukan, penyiangan, dan pembumbunan tanaman pelindung.

Lokasi yang Cocok untuk Menanam Porang

- Tanah gembur atau tanah yang tidak terlalu basah.
- Dataran tinggi 100-600 mdpl dengan cahaya matahari cukup.
- Campuran tanah liat berpasir dengan keasaman 6-7 Ph.
- Suhu ideal 25-35 derajat celsius.
- Curah hujan 1.000-1.500 mm/tahun.

5 Cara Peningkatan Porang

- Mengembangkan kapasitas peningkatan produksi.
- Mengaitkan dengan pangan lokal.
- Untuk penguatan cadangan dan sistem logistik pangan.
- Pengembangan dengan pertanian modern.
- Gerakan tiga kali ekspor (Geratieks).

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 31/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Keuntungan Produk Turunan Porang

- Rendah kalori
- Rendah karbon
- Rendah gula

Manfaat Kandungan Glukomanan Tinggi pada Porang

- Menjadi alternatif makanan sehat
- Menurunkan kadar kolesterol
- Menurunkan kadar gula darah
- Mencegah kanker
- Menurunkan berat badan
- Mengatasi sembelit

Beberapa Jenis Porang yang Memiliki Kandungan Glukomanan Tinggi



Porang kuning

55%

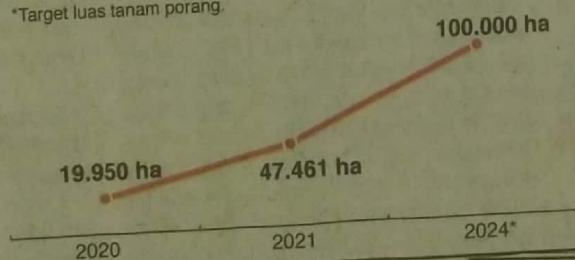
44%

Porang putih

Perkembangan Porang di Indonesia

Luas Tanam Porang di Indonesia

*Target luas tanam porang.



Ekspor Porang

Tahun	Volume Ekspor (ton)	Nilai Ekspor (Dalam miliar rupiah)
2019	11.721	644
2020	20.476	924,3

Sumber: Kementan/BPS/Antara/Litbang MI/Foto: MI/Denny Susanto/Antara

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 30/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☒ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Tajuk

Pahami Amarah Petani Bawang Merah

Harga komoditas pangan kita tak henti dihadapkan persoalan. Belum reda nasib pilu dialami para peternak telur, kini kondisi serupa tengah dirasakan para petani bawang merah.

Di sejumlah daerah seperti Demak, Jawa Tengah, pertanian bawang merah tengah memasuki masa panen raya. Sayang, harapan petani untuk merengguk untung lumayan hanyalah jadi khayalan.

Kini, harga bawang merah dari petani atau petik rata-rata dihargai Rp9.000/kilogram (kg). Para petani pantas pusing. Sebab, di saat kondisi normal, harga bawang merah petik mencapai Rp13.000/kg. *81/30/11*

Selisih Rp4.000/kg tentu jumlah yang sangat besar. Apalagi, bawang merah tergolong pertanian yang butuh dana besar, baik untuk bibit, pupuk, obat hama, solar, tenaga kerja, dan biaya ekstra lainnya. Bagi petani kelas bawah, sudah lazim untuk memenuhi kebutuhan itu, mereka biasanya pinjam ke koperasi atau perbankan. Ketika harga remuk, tentu pikiran mereka kian berkecamuk.

Sebagai bentuk kekecewaan, marah, dan protes atas anjloknya harga bawang merah ini, Karto Diharjo, 40, salah seorang petani di Dempet, nekat menceburkan diri ke selokan dan mandi lumpur di samping ladangnya. Aksinya yang direkam di video pada Kamis (28/10) itu pun viral. Aksi Karto ini tentu bukan sekadar bertujuan asal bisa viral, layaknya *content creator* di platform media sosial. Bisa jadi, aksi ini adalah puncak kekesalannya melihat harga bawang yang seolah liar. Dia dan petani lain merasa putus asa, dan bingung harus ke mana untuk mengadukan nasibnya.

Anjloknya harga bawang seperti dialami para petani di Demak menambah panjang kekisruhan pengendalian harga komoditas pangan di Tanah Air. Di saat panen raya secara nasional sudah lewat, anjloknya harga bawang di bulan Oktober ini juga seolah menjadi anomali. Lantas, apa sebenarnya yang memicu harga itu bisa anjlok?

Di sisi lain, otoritas yang berwenang seperti Kementerian Pertanian ataupun Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga

tampak belum merespons aktif fenomena yang tengah dialami petani ini. Anjloknya harga bawang merah pun sejatinya persoalan klise. Apalagi, jelang saat panen raya, maka sudah mafhum harga menjadi tak terkendali. Namun, Juni 2021 lalu, di saat panen raya belum mulai, harga bawang pun sudah anjlok. Masa Ramadan dan Idulfitri pun tak mampu mendongkrak harganya.

Kita patut prihatin atas nasib dialami para petani dan peternak yang tak kunjung henti ini. Perjuangan keras mereka untuk memenuhi kebutuhan mendasar pangan warga bangsa justru tak sebanding dengan respons pasar. Yang lebih menyakitkan, di saat mereka seolah sekarat, tak ada pihak yang berani memikul tanggung jawab.

Meski produksi bawang merah di Indonesia masih tergolong aman dan kebijakan impor belum dibuka, nyatanya komoditas ini tergolong labil. Tidak tahu apa penyebab pastinya. Yang jelas, komoditas ini memang masih menyisakan beberapa persoalan, antara lain, lahan yang masih terpusat di Jawa Tengah, yakni mencapai 70%.

Belum meratanya pertanian bawang merah berpotensi harga mudah mengalami fluktuasi. Ini bisa dipicu dari biaya logistik dan tak dampak tak meratanya kondisi infrastruktur jalan serta pelabuhan.

Masalah lain adalah minimnya tempat pendinginan (*cold storage*) di sentra penghasil bawang merah. Merujuk data Kemendag, saat ini baru ada satu *cold storage* di setiap kabupaten. Kondisi ini membuat hasil yang melimpah disimpan di tempat seadanya. Di sisi lain, bawang merah tergolong komoditas yang harus cepat dikonsumsi agar tidak rusak dan busuk.

Persoalan yang dihadapi petani bawang ini tak bisa dibiarkan. Pemerintah perlu segera turun tangan untuk menstabilkan harga agar petani makin tenang. Tingkat produktivitas saat ini sebenarnya sudah lumayan, yakni mencapai 99,26 kuintal/hektare. Bahkan, pada 2020, ada 1,8 juta ton yang dihasilkan atau naik 15% dari tahun sebelumnya. Prestasi ini selayaknya direspons dengan mengatur harga panen. Jangan sampai mereka marah bahkan akhirnya jera menanam bawang merah lagi. Jika itu terjadi, siap-siap saja akan memicu masalah yang lebih parah. □